MANAGEMENT OF COOPERATION ON AGRICULTURAL INVESTMENT AMONG ISLAMIC COUNTRIES: A STRATEGY FOR ACHIEVING FOOD SECURITY AND SOLVING POVERTY OF THE MOSLEM WORLD

Ulfa Jamilatul Farida, SIP., SHI.,MSI

ABSTRACT

One of definitions of Islamic Economic expresses that Islamic economic aims to study and realize the human being prosperity (al-falah) achieved through organizing natural resources based on cooperation and participation. From the definition, Islamic Economic as previously mentioned above, Islamic economic issues are not merely islamic financial institution and islamic banking, but also concerning about all dimensions of economic problem of people including food insecurity and poverty issues.

Global food crises occurred post 2008 have clearly figured out the susceptibility of food security of world countries not only in poor countries but also welfare countries. World Bank data shows that there are millions of hungry people everyday. Referring to FAO data, it is known that the buried countries in the world caused by food are primarily faced by Muslim countries. This research aims to study strengthening food security in Muslim countries and resolution mechanism. Food problem is a common problem that is difficult to be overcome by each country alone. That is why a cooperation mode becomes important to overcome food problem of Muslim countries. Food problem is economic problem both conventional and Islamic economic. A multitude of factors are expected to cause continued food price increases as evidenced by World Bank's food price index in January 2011, which rose 29% above its level from a year earlier. From Egypt, Indonesia, Bangladesh, and Sudan, to Pakistan–many of the 57 OIC (Organization of Islamic Conference) member countries are facing some of the worst pains of this global food crisis.

This study uses an approach of food management and integration patterns issued by Ernst B .Hass. The basic idea is an integration process to realize an effective "political community". In addition, by using a classification model of OIC member states based on the potential of natural resources, especially agriculture and food, this research aims to figure out a pattern of agricultural investment cooperation among Muslim countries. Finally, this

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paper provides a unique explanation of the OIC countries in terms of food resources and the possibilities of cooperation that can be done to overcome the food crisis and the Islamic world poverty.

Keywords: *food security, poverty, investment in agriculture.*

Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai kajian Islam dalam bidang ekonomi atau sering disebut ilmu ekonomi Islam atau ekonomi syariah senantiasa menarik dan dinamis. Salah satu definisi ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mengkaji dan mewujudkan kesejahteraan manusia (*al-falāh*) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.[530] Definisi tersebut diatas adalah ekonomi Islam yang berkerangkakan *maqāşid al-syarī'ah.*[531] Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayāt at-tayyibah*).[532] Dari definisi dan tujuan ekonomi Islam sebagaimana tersebut di atas jelas ekonomi Islam bukan hanya lembaga keuangan Islam dan perbankan Islam, namun menyangkut semua dimensi masalah ekonomi umat termasuk dalam hal ini masalah pangan.

Di tengah kehidupan sejahtera dan serba berkecukupan di hampir seluruh penduduk negara maju dan beberapa kelompok di negara yang sedang berkembang, fakta memperlihatkan bahwa terdapat 25000 orang yaitu terdiri 18000 anak-anak dan 7000 orang dewasa meninggal karena kelaparan dan lebih dari 1 milyar orang kelaparan setiap malamnya di seluruh pelosok dunia.[533] Hal ini berlawanan dengan hak dasar bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Makanan adalah hak yang pertama harus dipenuhi untuk sebuah kehidupan di dunia ini. Dari data FAO daftar sebaran penduduk yang mengalami kelaparan dan ketidaktahanan pangan adalah negara-negara muslim yang juga merupakan kelompok negara anggota

[530] Lihat Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, *al-Ahka`m al-Sultha`niyyah*, Dar al-Fikr, Beirut [nd]. Juga lihat A.A. Islahi, "Economic Concept of Ibn Taimiyyah", dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought, 1992).

[531] Lihat juga M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003).

[532] Al-Qur'an menyebut kata *falāh* dalam 40 tempat. *Falāh* mencakup konsep kebahagiaan dalam dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Kebahagiaan dimensi duniawi, *falāh* mencakup tiga aspek, yaitu: (1). Kelangsungan hidup, (2). Kebebasan dari kemiskinan, (3). Kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam kebahagiaan dimensi akhirat, *falāh* mencakup tiga aspek pokok juga, yaitu: (1).Kelangsungan hidup yang abadi di akhirat, (2).Kesejahteraan abadi, (3).Berpengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. Lihat *Ibid*., hal.7.

[533] Lihat Md Sirajul Islam Molla, "18000 Children Die of Starvation Everyday: Cannot We Save Them?", dalam Mohamed Behnassi, Sidney Draggan, Sanni Yaya (Ed.), *Global Food Insecurity, Rethinking Agricultural and Rural Development Paradigm and Policy*, (New York: Springer, 2011), hal. 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi konferensi islam (OKI) yaitu antara lain: Banglades dan negara-negara Afrika sub Sahara.[534]

Dalam konteks ini, masyarakat yang tidak dapat mengembangkan penyesuaian diri terhadap kerentanan-kerentanan yang ada akan mengakibatkan terjadi ketahanan pangan yang tidak baik. Bentuk ketidaktahanan pangan ada dua macam yaitu bersifat *transitori* dan bersifat *kronik*. Ketidaktahanan *transitori* adalah masyarakat yang kekurangan makanan akibat bencana alam atau gagal panen, sementara ketidaktahanan *kronik* adalah kekurangan makanan yang terus menerus karena daya beli dan sumber daya insan yang rendah.[535] Kondisi kemiskinan di negara-negara muslim ini rata-rata adalah kelaparan atau ketidaktahanan pangan kronik.

Mengapa terjadi kemiskinan dan siapa yang idealnya bertanggung jawab terhadap masalah kemiskinan tersebut? Secara umum kemiskinan yang berakibat pada kondisi kelaparan dan ketidaktahanan pangan disebabkan oleh sistem proteksi yang berakibat pada penyalahgunaan fungsi makanan, makanan yang berkualitas rendah, sistem pasar yang buruk, kekerasan dalam suatu negara atau kondisi perang, jumlah penduduk yang berlebihan, wabah penyakit, dan lain sebagainya.[536]

Kondisi sebagaimana terurai di atas adalah kondisi riil masyarakat dunia pada umumnya dan rakyat di negara muslim pada khususnya. Berangkat dari gambaran ini penelitian ini fokus bagaimana sikap Islam secara operasional menjawab masalah buruknya ketahanan pangan negara-negara muslim. Dalam konteks tujuan ekonomi Islam maka penelitian ini membahas bagaimana secara konseptual masalah ketahanan pangan di negara-negara muslim dapat diatasi.

Pembahasan ketahanan pangan dalam ekonomi Islam idealnya masuk kategori isu utama ekonomi Islam mengingat sebagian besar negara muslim mengalami hal tersebut. Sistem ekonomi dunia selama ini (kapitalis) menjadikan negara-negara muslim menjadi negara pinggiran, sehingga secara sistemik rentan dengan masalah kemiskinan dan kekurangan pangan.[537] Selain itu terdapat data yang lebih menyudutkan masalah ketahanan pangan negara-negara muslim yaitu proporsi impor bahan pangan di negara-negara muslim jauh lebih besar dibandingkan dengan ekspornya, dan hal ini diperparah dengan keadaan seringkali terjadi goncangan harga jual beli bahan pangan dunia yang tidak imbang dengan harga domestik.[538] Masalah ketahanan pangan di negara-negara muslim sudah demikian kompleks namun belum terlambat untuk diatasi dan hal ini dapat menjadi *entry point* ekonomi Islam memasuki isu ketahanan pangan.

---

[534] *Ibid*.
[535] John Shaw, *World Food Security: A History Since* 1945, (New York: Palgrave Macmillan, 2007)
[536] Lihat Md Sirajul Islam Molla, "18000 Children Die ...., hal. 129.
[537] Lihat Immanuel Wallerstein, *World System Analysis: An Introduction,* (Amerika: Duke University Press, 2005).
[538] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka muncul pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana pola manajemen kerjasama yang efektif untuk mencapai penguatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan di dunia Islam?

Kerangka Teori

Definisi Ekonomi Islam

Mengingat banyaknya definisi ekonomi Islam maka dalam konteks penelitian ini definisi ekonomi Islam merujuk pada definisi ekonomi Islam oleh Muhammad Akram Khan. Muhammad Akram Khan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia (*al-falāh*)[539] yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Adapun definisi sebagaimana tersebut di atas memiliki tiga kunci konsepsional, yakni:

- *al-falāh* yakni kesejahteraan;
- *resources* atau sumber-sumber daya, dan;
- kooperasi dan partisipasi.[540]

Prinsip Hubungan Ekonomi Internasional dalam Islam

M.N. Siddiqi[541] dalam tesisnya yang berjudul "Principles of International Economic Relations in Islam" menyatakan bahwa dalam konteks hubungan ekonomi internasional prinsip Islam yang diterapkan adalah sebagai berikut:[542]

➢ *Universality*

[539]Lihat Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, *al-Ahka`m al-Sultha`niyyah*, Dar al-Fikr, Beirut [nd]. Juga lihat A.A. Islahi, "Economic Concept of Ibn Taimiyyah", dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought, 1992).

[540] Disarikan dari Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Institutes of Policy Studies, IIIT, 1994), hal.33-49. Dan lihat dalam Anas Zarqa', "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidid Ghazali dan Syed Omar (eds), *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), hal. 29-38.

[541] Professor, Department of Economics and Center for Reseacrh in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah.

[542] Disarikan dari M.N. Siddiqi, "Principles of International Economic Relations in Islam", dalam Islamic Development Bank and Islamic Research and Training Institute, *International Economic Relations from Islamic Perspectives*, (Jeddah, Saudi Arabia: IDB-IRTI, 1992).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Brotherhood and cooperation*
- *Justice and fair dealings*

Selanjutnya dalam tujuan eksistensi "Ummah" maka dalam hubungan ekonomi internasional penting untuk mewujudkan kebijakan internal dan eksternal yang berbasis dengan syari'ah Islam. Islam sangat menekankan kebebasan dalam perdagangan sehingga jika melihat konteks sekarang di mana negara-negara besar sangat dominan maka dalam perspektif Islam kerjasama ekonomi internasional harus bermuatan nilai humanitarian dan perlindungan terhadap hak pihak yang lemah. Dalam hal ini maksudnya bahwa ketika terjadi gerakan agresif dari negara industri besar untuk mengembangkan bisnis ekonomi di negara berkembang khususnya negara muslim yang masuk kategori berkembang sehingga sangat mendesak negara berkembang ini maka idealnya terdapat institusi yang mengatur gerak modal dan tenaga kerja dan juga melindungi sektor industri mereka. Jika negara muslim yang sedang berkembang tidak mampu *bargaining position* dengan industri negara kaya maka harus ada lembaga yang mewakilinya sehingga hak-hak nya terlindungi.

Kerangka Fungsionalisme dalam Integrasi

Neo fungsionalisme adalah salah satu pemikiran dari teori integrasi yang paling menyeluruh, sekalipun banyak mendapat kritikan. Pendekatan ini mempunyai peran yang signifikan dalam analisa ekonomi politik internasional. Neo fungsionalisme pada dasarnya dapat dilihat sebagai sebagai kelanjutan dari tradisi berfikir kaum fungsionalisme. Berbicara mengenai teori integrasi, dalam hal ini akan diambil beberapa pendapat tentang integrasi dari aliran fungsionalisme. Menurut Ernst B. Hass, integrasi adalah:

> "integration as a process "whereby political actors in several distinc national settings are persuaded to shift their loyalities, expectations, and political activities toward a new center, whose institutions process or demand jurisdiction over the preexisting national states."[543]

Tampak dalam definisi ini bahwa integrasi adalah suatu proses di mana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat baru yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut jurisdiksi atas negara-negara nasional yang ada sebelumnya. Yang terpenting dari definisi ini adalah gagasan bahwa hasil akhir suatu proses integrasi berujud "komunitas politik".

[543] James Daugherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of Internastional Relations A Comprehensive Survey Third Edition*, (New York: Harper Collins Publisher, 1990), hal. 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih dalam kerangka integrasi, terdapat satu dasar konseptual dalam Islam yang penting yaitu masalah kerjasama. Secara filosofi al-Quran menyebutkan tentang pentingnya kerjasama sesama muslim yang salah satunya terdapat dalam SQ. al Maidah (5):2, yaitu:

... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

"…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Tesis utama neo fungsionalisme adalah bahwa integrasi dalam satu sektor cenderung ekspansif merangsang timbulnya integrasi di sektor-sektor lain. Ini merupakan strategi yang ditawarkan untuk menuju unifikasi politik. Dalam konteks mengatasi ketahanan pangan negara-negara muslim dengan adanya kerjasama dan integrasi ekonomi dapat meminimalisir keterbatasan-keterbatasan yang muncul sehingga masalah dapat teratasi.[544]

Ketiga kerangka konseptual di atas yakni: hubungan ekonomi internasional dalam Islam, manajemen strategi, dan teori integrasi berfungsi secara terpadu dan membentuk kerangka teoretik yang selanjutnya menjadi pisau analisa untuk menjawab masalah penelitian ini. Hubungan ekonomi internasional dalam Islam menjadi akan pemetaan ekonomi makro dan mikro dalam ekonomi Islam dan posisi isu ketahanan pangan dalam ekonomi Islam. Setelah itu manajemen strategi membantu membuat formulasi penyelesaian masalah ketahanan pangan dunia Islam termasuk di dalamnya pemetaan potensi investasi dan selanjutnya integrasi menjadi kerangka penyelesaian.

Konsep *New Economy Strategies (NES)*

Konsep *New Economy Strategies* dipergunakan untuk analisa pemetaan kerjasama. Konsep *New Economy Strategies* merupakan kerangka strategi ekonomi yang konstruktif yang dikemukakan oleh Richard Seline.[545] Dalam kerangka ini terdapat pemetaan dengan mekanisme pengidentifikasian terhadap kekurangan dan kelebihan masing-masing negara sehingga muncul formulasi kerjasama efektif yang dapat

[544] Lihat A.H.M. Sadeq, *Islamic Economics Some Selected Issues*, (Lahore-Pakistan: Islamic Publications (PVI) Ltd., 1989), hal. 101.

[545] Richard Seline, "Global Hubs and Global Nodes: Challenging Traditional Views of Communities, Clusters and Competitiveness", *Community College Journal*, Vol. 76 (3), 2005, 38-41. Dapat diakses: http://www.aacc.nche.edu/Publications/CCJ/Pages/default.aspx

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan. Kerangka NES Richard Seline dihasilkan dari penelitian dan pengujian di wilayah Amerika, namun demikian kerangka ini sangat relevan untuk dipergunakan dalam konteks negara muslim sebagaimana konteks penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan NES Richard Seline sebagai berikut:

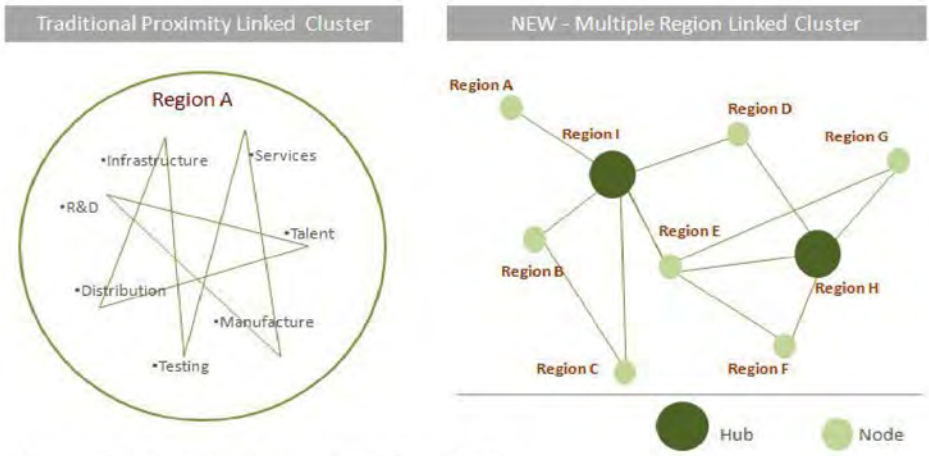

Source: Based on 'New Economy Strategies' concepts by Richard Seline

Gambar di atas memperlihatkan perubahan kecenderungan klaster ekonomi atau kluster perilaku ekonomi yang tradisional berubah ke perilaku kluster ekonomi yang baru yang memetakkan hubungan antara negara-negara "hub" dengan negara-negara "node".[546] Dalam rangkaian klaster NES di atas, pusat (*hub*) merupakan wilayah khusus yang mempunyai komoditas cukup penting untuk mendukung arah pembangunan, sedangkan *Node* adalah suatu lokasi yang secara signifikan dapat mendukung pusat dengan program-program yang berfungsi melengkapi.

Teknis Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Critical Discourse Analysis* atau disingkat CDA (analisis wacana). CDA merupakan bantuan dalam analisis berbasis bahasa-data. Selanjutnya analisa ekonomi politik membantu dalam analisa proses integrasi. Dengan demikian posisi CDA adalah sarana mengatasi masalah *positionality* dimana pengetahuan tidak pernah menjadi fenomena netral atau objektif, tetapi sangat tergantung dengan masalah tempat dari mana orang berbicara, kepada siapa, dan untuk apa tujuannya.[547]

[546] *Ibid*.
[547] Baca Chris Baker and Dariuzs Galasinaaski, *Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity*, (London: SAGE Publications Ltd., 2001), hal. 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan

1. Pangan sebagai Senjata Baru dalam Dominasi Global

a) Konteks Global

Pasca perang-perang besar seperti perang dunia I, perang dunia II, dan perang dingin, maka dominasi global tidak lagi diwarnai dengan perang yang berskala dunia, namun dominasi global tetap ada melalui perang model baru atau penjajahan model baru. Penjajahan model baru lebih bersifat gerakan yang agresif dari negara maju untuk menguasai sumber-sumber daya alam di dunia melalui sistem ekonomi politik internasional.

Krisis pangan global tahun 2007-2008 menjadi sebuah momentum penting bahwa basis negara kepada sektor pertanian sangat penting. Jika dilihat dalam sejarah pasca perang dunia II, memang ada beberapa kali krisis pangan dunia dan salah satu yang berskala besar adalah tahun 2007-2008.[548]

Dari masalah krisis pangan tahun 2008 ini, dampaknya masih terjadi sampai sekarang, sehingga pangan menjadi masalah yang sangat penting dan serius. Pada dasarnya sudah sejak lama negara-negara maju/kaya mengincar dan melakukan investasi pertanian namun memang filosofinya adalah penguasaan akan sumber, dan karena dipicu krisis pangan tersebut maka gerak investasi pertanian negara maju di negara berkembang yang potensial semakin agresif. Dari kondisi krisis ini mengakibatkan harga pangan labil dan negara-negara mulai membuat strategi mengatasi dan mengantisipasinya. Fakta ini bahwa pangan menjadi senjata baru dominasi global.

Menurunnya harga komoditas pangan akibat krisis ekonomi global pasca 2008 ibaratnya hanya semacam ambil napas sebelum harga kembali merangkak naik dengan naiknya permintaan dunia sejalan dengan mulai pulihnya ekonomi global, terus bertumbuhnya dengan kuat ekonomi China dan India, serta adanya faktor lain yang menjadi kendala produksi, seperti faktor iklim dan kompetisi penggunaan lahan antara komoditas pangan dan biofuel.

b) Gerak Invasi Lahan Pertanian untuk Pemenuhan Pangan

Komoditas pertanian dan pangan menjadi komoditas emas baru yang diburu. Melalui *agricultural outsourcing*, negara-negara maju dan korporasi multinasional menggelontorkan dana miliaran dollar AS untuk investasi di sektor produksi pangan dan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel). Muncul fenomena ”negara melakukan investasi di lahan pertanian negara lain untuk mengamankan pasokan pangan di dalam

[548]Disarikan dari: Baris Karapinar and Christian Harbeli (Ed), *Food Crisis and The World Trade Organization*, (New York: Cambridge University Press, 2010), hal. 1-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negerinya sendiri" dengan mengakuisisi lahan-lahan pertanian (*land grab*) di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, serta memanfaatkan buruh tani murah lokal dan berbagai kemudahan yang ditawarkan negara tuan rumah.[549]

Target "pencaplokan tanah" mereka terutama adalah negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin, kawasan dengan ratusan juta penduduk masih mengalami kelaparan. Negara yang diincar bukan hanya negara berlahan subur, seperti Brasil, Rusia, atau Ukraina, tetapi juga negara pertanian miskin, seperti Kamerun, Etiopia, Madagaskar, dan Zambia, yang selama ini tak banyak dipertimbangkan sebagai lahan investasi. Negara-negara ini mendadak sangat menarik dan mengundang investor dari seluruh dunia yang menginginkan lahan pertanian mereka. Jumlah investor yang mengajukan izin menggarap lahan di Etiopia dalam beberapa tahun terakhir mencapai 80.000 investor lebih, tetapi hanya 2.000 yang berhasil mendapatkan konsesi lahan.[550]

Berdasarkan perkembangan investasi pertanian di atas, sektor pangan menjadi komoditas investasi yang sangat diminati dan yang menjadi masalah adalah negara kaya ataupun investor swasta hanya mengutamakan keuntungan semata. Dalam hal ini jelas tidak saja negara atau investor non muslim namun juga negara dan investor muslim hanya mementingkan keuntungan dan keberlanjutan bisnisnya sehingga jelas logika kapitalis yang berorientasi keuntungan yang besar dengan eksploitasi menjadi dasar investasi mereka.

c) Eksistensi WTO untuk Keamanan Pangan Negara-negara muslim

Sistem perdagangan internasional yang dipromosikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) termasuk di dalamnya sistem liberalisasi pasar sangat merugikan para petani kecil di negara-negara miskin. Sistem perdagangan WTO ini juga meningkatkan risiko dan ketergantungan negara miskin terhadap produsen besar, mengancam keamanan pangan, menimbulkan kelaparan dan kemiskinan.[551] Menurut De Schutter teori keamanan pangan yang memisahkan antara wilayah penghasil pangan (*food-surplus regions*) dan wilayah yang kekurangan pangan (*food-deficit regions*), antara negara eksportir dan importir pangan, antara pemenang dan pecundang tidak lagi bisa diterima.[552]

---

[549] http://regional.kompas.com/read/2009/09/04/0419296/Menyemai.Bibit.Baru.Krisis. Pangan. Diakses 10 Maret 2012, jam 10.00 wib.

[550] *Ibid*.

[551] Mohamed Behnassi, Sidney Draggan, Sanni Yaya (Ed.), *Global Food Insecurity, Rethinking Agricultural and Rural Development Paradigm and Policy*,…, hal. 103-104.

[552] Olivier De Schutter was appointed the Special Rapporteur on the right to food in May 2008 by the UN Human Rights Council. He is independent from any government or organization. Baca: *"The World Trade Organization and the Post-Global Food Crisis Agenda: Putting Food Security First in the International Food System,* see: http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20111116_briefing_note_05_en.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

De Schutter menekankan, WTO harus menyadari bahaya ketergantungan negara miskin terhadap sistem perdagangan pangan dunia. Negara miskin akan dirugikan oleh volatilitas (risiko naik turunnya) harga pangan sehingga mereka akan terjebak pada kemiskinan dan kelaparan yang berkepanjangan yang akan dirasakan baik oleh masyarakat perkotaan maupun di pedesaan. Biaya untuk memenuhi kebutuhan pangan negara miskin meningkat lima hingga enam kali lipat antara 1992 dan 2008. Sebanyak 25% kebutuhan pangan negara miskin saat ini dipenuhi melalui impor.[553]

Dari fakta tersebut di atas maka khususnya di bidang pangan, eksistensi WTO tidak dapat mewakili kepentingan negara-negara dunia Ketiga di mana mayoritas negara muslim di dalamnya. Kebijakan WTO selama ini selalu mempromosikan liberalisasi atau perdagangan bebas sangat merugikan petani miskin. Negara miskin selain kesulitan mengakses pasar internasional juga menjadi korban eksploitasi lahan, air dan sumber daya alam dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang seringkali adalah perusahaan multinasional asing melalui pola bagi hasil yang tidak adil di sektor pertanian bahkan di sektor pertambangan.

2. Kebutuhan Pangan dalam Ekonomi Islam

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa salah satu definisi ekonomi Islam yang sangat relevan adalah definisi yang menyatakan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia (*al-falāh*) [554] yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Definisi menurut Muhammad Akram Khan ini berimplikasi secara positif dalam ekonomi Islam baik secara makro maupun mikro yang mana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel.1

Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam *Fālah*[555]

Unsur *Fālah*	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan Hidup	• Kelangsungan hidup biologis; kesehatan, kebebasan keturunan, dan sebagainya.	• Keseimbangan ekologi dan lingkungan

[553] *Ibid*.

[554] Lihat Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, *al-Ahka`m al-Sultha`niyyah*, Dar al-Fikr, Beirut [nd]. Juga lihat A.A. Islahi, "Economic Concept of Ibn Taimiyyah", dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought, 1992).

[555] Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics….*, hal. 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	• Kelangsungan hidup ekonomi; kepemilikan faktor produksi	• Pengelolaan sumber daya alam • Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk.
	• Kelangsungan hidup sosial; persaudaraan dan harmoni hubungan sosial.	• Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok.
	• Kelangsungan hidup politik; kebebasan dalam partisipasi politik.	• Jati diri dan kemandirian
Kebebasan berkeinginan	• Terbebas dari kemiskinan	• Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk

Dari tabel diatas dan jika ditarik dalam konteks penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam kebutuhan pangan masuk kategori pertama yaitu terkait kelangsungan hidup dan selebihnya tentu tetap terkait kategori lainnya. Dari kerangka ini mulai terjawab rasionalisasi dan signifikansi penelitian ketahanan pangan dalam konteks ekonomi Islam.

Kemudian masih terkait dengan isu pangan bagaimana akar permasalahan ekonomi membuat sebuah deskripsi? Dalam hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:[556]

[556] Munrohim Misanam, M. Bekti Hendri Anto, Priyonggo Suseno, Textbook, *Ekonomi Islam….*, hal. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan.2 Akar Permasalahan Ekonomi

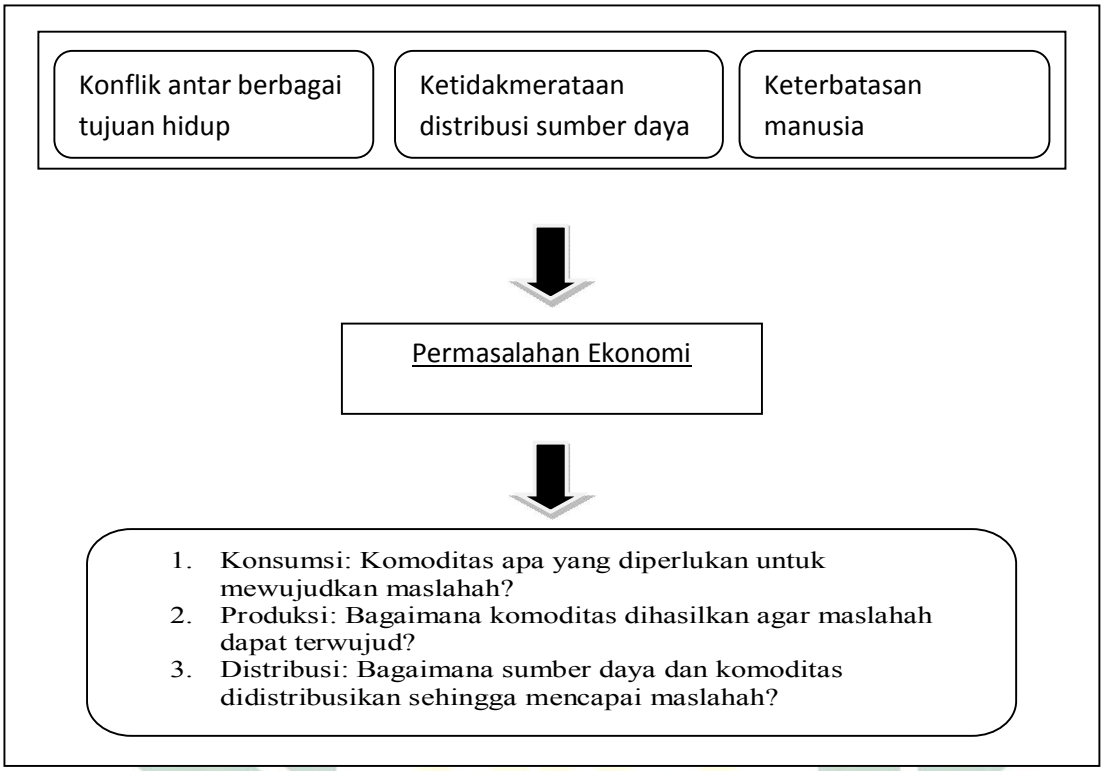

Dalam pembahasan mengenai akar masalah ekonomi yang diawali dari konflik antarberbagai tujuan hidup, ketidakmerataan distribusi sumber daya, dan keterbatasan manusia. Terkait ketahanan pangan, pertama mengenai konflik antarberbagai tujuan hidup, maka jelas tatanan ekonomi dunia yang sekarang ini secara mayoritas dikuasai kapitalisme, bahkan paradigma kapitalisme juga secara praktis dijalankan di negara-negara muslim. Dalam logika ini maka konflik antarberbagai tujuan hidup seirama dengan teori sistem dunia yang menyebutkan klasifikasi negara dengan tiga kategori: negara *core* (inti), negara *semi phery-phery* (semi pinggiran) dan negara *phery-phery* (pinggiran).[557]

Ketidaktahanan pangan biasa terjadi di dua kategori negara yang terakhir. Dari realitas ini jelas dalam logika kapitalis, ketika terjadi kekurangan di negara lemah maka itulah kesempatan negara *core* (kuat) untuk membuat negara lemah (*semi phery-phery* dan *phery-phery*) tersebut tergantung dengan negara kuat (*core*). Kondisi sekarang ini, bukan hal yang aneh jika rantai pertambahan nilai dipotong dengan cara menempatkan potongan aktivitas yang padat karya dalam produksi barang-barang yang secara

[557] Immanuel Wallerstein, *World System Analysis: An Introduction*….

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisional dianggap sebagai produk padat modal, teknologi dan memerlukan keahlian tinggi di wilayah dengan upah buruh yang rendah.[558]

Lebih lanjut dalam kerangka kapitalisme global, pembagian kerja global yang baru sedang menggeser hubungan *core-periphery* dengan memasukkan beberapa segmen dari Dunia Ketiga menjadi bagian dari *core* sembari mendegradasi beberapa unsur lainnya dari *core* di pusat maupun di Negara-negara berkembang menjadi *periphery*. Hubungan pusat dan pinggiran menjelma menjadi hubungan sosial, tidak lagi hubungan berbasis geografis.[559] Ketika hal ini secara praktis dilakukan maka yang terjadi adalah bukan pengentasan dari ketidaktahanan pangan namun justru pembuatan kemiskinan berkelanjutan, hal ini dapat melalui mekansime hutang melalui lembaga keuangan dunia seperti IMF, World Bank, dan lain sebagainya.

Selanjutnya tentang ketidakmerataan distribusi sumber daya. Dalam konteks ini jelas pada dasarnya masing-masing negara bangsa mempunyai potensi sumber daya yang jika dikelola dengan baik akan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Masalah distribusi sumber daya dalam konteks negara tentu pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur sehingga rakyat tidak mengalami masalah. Dalam konteks ketahanan pangan, banyak sekali penyimpangan dalam masalah pengelolaan bahan pangan, dan ironisnya seringkali ketika kelangkaan pangan terjadi justru penimbunan dilakukan oknum yang dekat dengan pemerintah dan mengendalikan harga.

Selanjutnya mengenai keterbatasan manusia. Manusia sebagai agen dari aktifitas ekonomi jelas memiliki keterbatasan-keterbatasan. Manusia jika ditarik secara makro sebagai pelaku ekonomi maka identitas ini melekat pada negara dan pemerintahan. Ketika terjadi keterbatasan secara ideal akan melakukan upaya untuk mengatasinya yaitu dapat melalui mekanisme kerjasama.

Dari ketiga akar masalah ekonomi diatas maka muncul permasalahan ekonomi yaitu kelangkaan relatif. Jika terjadi kelangkaan relatif maka dalam konteks ini pihak yang berkewajiban (pemerintah atau negara) wajib melakukan upaya-upaya solutif untuk mengatasinya. Mekanisme mengatasi masalah ini meliputi penyelesaian masalah konsumsi, produksi, dan distribusi.

Dalam ekonomi Islam dimana sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa orientasi ekonomi Islam adalah kesejahteraan maka dalam konteks penelitian ini jelas kesejahteraan yang ingin dicapai adalah ketercukupan pangan. Dari uraian di atas jelas masalah pangan merupakan isu ekonomi Islam yang sudah seharusnya mendapat perhatian dan upaya penyelesaian. Hal ini sangat signifikan untuk dibahas mengingat

[558] Paul Krugman, "Growing World Trade" in *Brookings Papers on Economic Activity* (1995), hal. 327-377.
[559] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cita-cita mulia ekonomi Islam tentang *al-falāh* tidak mungkin tercapai ketika umat masih mengalami krisis pangan.

3. Gambaran Masalah Ketahanan Pangan Negara-negara Muslim

Dari data FAO memperlihatkan bahwa mayoritas penderita ketidaktahanan pangan adalah negara-negara di Afrika sub-Sahara yang nota bene negara muslim maka untuk wilayah ini akan lebih komprehensif pembahasannya. Dalam perkembangannya sampai tahun 2011 di wilayah negara berkembang secara umum sektor pertanian mampu mencukupi pangan bahkan meningkat 40%, namun di Afrika sub-Sahara justru menurun sebesar 5%. Hal ini cukup tragis yaitu ketika sekitar 70% penduduk Afrika sub-Sahara bertani namun mereka semua mengalami ketidaktahanan pangan kronik.[560] Meskipun lahan Afrika-sub Sahara sangat luas dibandingkan dengan wilayah negara lain di dunia namun lahan ini tidak subur untuk pertanian dikarenakan kemarau panjang membuat lahan kering, dan juga ketika bertani terdapat tanaman-tanaman parasit yang sulit diatasi akhirnya mengakibatkan gagal panen.

Selanjutnya untuk mengetahui beberapa masalah ketahanan pangan di negara-negara muslim dapat dilihat sample data pada tabel berikut ini:

Tabel. 2

Kondisi Ketidaktahanan Pangan Negara Muslim[561]

Negara	Populasi (juta jiwa)	HDI Ranking	Masalah Ketahanan Pangan	% penduduk krisis pangan
Afganistan	25.067 (2005) (*Source: UNDP-HDR 2007/2008*).	181 dari 182 *(UNDP – statistical update 2009)*	(1) harga pangan dunia tinggi sehingga harga lokal naik; (2) gagal panen karna curah hujan yang tinggi, (3) panen gandum sedikit karena kemarau; (4) keamanan tidak stabil dan transportasi minim, dan (5) batasan ekspor oleh	35-40%

[560] *Ibid*.

[561] Disarikan dari FAO, *High Level Task Force on the Global Food Security Crisis Progress Report April 2008-October 2009* (United Nations-FAO, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara	Populasi (juta jiwa)	HDI Ranking	Masalah Ketahanan Pangan	% penduduk krisis pangan
			negara lain (pajak) (Pakistan, Kazakhstan, Iran)	
Banglades	153.3 (*UNDP HDR 2007/2008)*	146 dari 182 (UNDP Human Development Report 2009)	(1).Harga makanan tinggi; (2).Pembatasan ekspor dari para penyalur normal; bencana alam (banjir, angin puyuh Aila), menyebabkan 4 juta petani menganggur.	31-50% (30 juta penduduk termasuk 'Hard-core poor')
Mozambique	20.5 (2005) *(UNDP HDR 2007)*	172 dari 182 *(UNDP HDR 2009)*	(1).sangat peka ke bencana alami (kekeringan), (2). Rendahnya daya beli bahan pangan karena kemiskinan.	29%
Niger	14.3 juta (2008) *(INS 2009)*	182 dari 182 *(UNDP – statistical update 2009)*	(1).Kurang dari 12% daratan cocok untuk bertanam; pertanian. (2)Kekeringan berkelanjutan dan lahan lemah/miskin membatasi produktivitas; (3)Krisis politik sehingga harga pangan tinggi, (4).Ketergantungan tinggi terhadap bantuan eksternal.	50%
Pakistan	173.2 (2007) *(UNDP HDR 2009)*	141 dari 182*(UNDP –HDR 2009)*	(1). Gap dalam masalah impor bahan makan (gandum), (2). konflik politik.	18%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara	Populasi (juta jiwa)	HDI Ranking	Masalah Ketahanan Pangan	% penduduk krisis pangan
Tajikistan	6.74 million (2007) *(WB)*	124 dari 179 *(statistical update 2008; UNDP)*	(1).masalah struktural, (2). Kelangkaan sumber daya dasar (kelangkaan air dan daratan), (3).efek perubahan iklim, (4).perang saudara yang panjang, (5).musim dingin yang ekstrim, (4).Harga pangan tidak terjangkau. yang] yang berikutnya beredar.	30%
Yaman	21.1 (2005) *(UNDP HDR 2007)*	138 dari 179 *(UNDP – statistical update 2008)*	(1).Kekurangan gizi, yang diperburuk krisis bahan pangan. (2).Ketidakstabilan politik ,(3).Merosotnya pendapatan minyak. (4).Tingginya ketergantungan impor.	22%

Dari kondisi ketidaktahanan pangan negara-negara muslim diatas dengan varian masalah yang mengakibatkan lemahnya keamanan pangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jenis ketidaktahan pangan secara merata dikarenakan ketidaktahanan pangan kronik, hanya ada beberapa yang diakibatkan ketidaktahanan pangan transitori seperti ketika ada banjir, angin puyuh, dan badai musim dingin.

Berdasarkan data FAO tahun 2011, dari total penduduk di 57 negara anggota Organisasi Konferensi Islam memperlihatkan bahwa 15% penduduknya dalam kondisi kelaparan yang parah.[562] Lebih lanjut fakta menyebutkan bahwa di negara-negara miskin ini 60-65% pendapatan digunakan untuk mendapatkan makanan, sedangkan di negara maju pengeluaran untuk makanan 10-15% dari pendapatan. Hal ini tentu saja memunculkan masalah baru bagi masyarakat di negara miskin yaitu dimana tidak

[562] FAO "FAO Food Security 2011" Report, available at: http://www.fao.org/publications /sofi/en/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya biaya untuk alokasi pendidikan dan juga pemeliharaan kesehatan dari pendapatan.

Negara-negara muslim jika diklasifikasikan dalam konteks kondisi ketahanan pangan, tingkat pendapatan dan impor pangan, maka dapat dibedakan dalam empat kelompok negara yaitu:

1) Negara dengan mal-nutrisi yang tinggi dan pengimpor pangan tinggi, misalnya: Somalia, Tajikistan, Yaman.
2) Negara dengan mal-nutrisi yang tinggi dan penghasil pertanian yang baik, misalnya: Pakistan, Sudan.
3) Negara dengan pendapatan tinggi (kaya) dan pengimpor pangan tinggi, misalnya: Uni Emirat Arab, Saudi Arabia.
4) Negara dengan kondisi ketahanan pangan baik dan ekspor pangan tinggi, misalnya: Malaysia, Turki.[563]

Selanjutnya dalam angka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3

High Income and Most Undernourished States

HIGH INCOME - NET FOOD IMPORT COUNTRIES		**MOST UNDERNOURISHED OIC COUNTRIES**	
Facing Food supply fluctuation		Facing immediate human crisis	
COUNTRY	Net Food Trade Balance, (USD thousand)	COUNTRY	Proportion of undernourished in population (2005-07)
Saudi Arabia	($9,782,137)	Somalia	62%
UAE	($6,932,653)	Comoros	46%
Kuwait	($2,061,772)	Mozambique	38%
Lebanon	($2,033,512)	Chad	37%
Libyan	($1,795,207)	Afghanistan	35%
Jordan	($1,399,942)	Sierra	35%
Oman	($1,163,893)	Yemen	31%

[563] Dinar Standard Analysis, dapat di akses pada: dinarstandardanalysis.org.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qatar	($852,540)	Tajikistan	30%
Albania	($709,377)	Togo	30%
Bahrain	($450,717)	Djibouti	28%
Brunei	($272,279)	Bangladesh	27%
Source: ITC Trade Map Data 2009, FAO State of Food Insecurity, 2010, Dinar Standard Analysis			

Dari gambaran di atas sangat jelas bagaimana buruknya kondisi ketahanan pangan di mayoritas negara muslim, dan di sisi lain beberapa negara muslim juga mempunyai tingkat kemakmuran yang tinggi. Dari fakta ini dalam konteks menyelesaikan krisis pangan idealnya banyak hal yang dapat dikerjasamakan.

4. Strategi Kerjasama Efektif antar Negara Muslim untuk Ketahanan Pangan

Wacana Terbentuknya *Islamic World Trade Organization* (IWTO)

Sebagaimana terurai sebelumnya bahwa pergerakan investasi pertanian oleh para pemodal besar jika tidak ada yang mampu dan berkuasa mengatur akan sangat membahayakan bagi negara miskin tujuan investasi. Sesuai dengan kerangka M.N. Siddiqi mengenai hubungan ekonomi internasional dalam Islam, dalam konteks ini terintegrasinya negara-negara muslim secara terstruktur dan berfungsi efektif menjadi satu kekuatan baru yang sangat penting dan strategis.

Untuk membuat model integrasinya, penelitian ini menggunakan fungsionalisme yang merupakan cabang dari strukturalisme, yaitu bentuk strukturalisme yang menggunakan metode keseimbangan. Pencetus fungsionalisme Emile Durkheim menyatakan bahwa fakta-fakta sosial membutuhkan penjelasan kemasyarakatan yang bersifat fungsionalis. Sebagai model yang diambil dari ilmu-ilmu alam, fungsionalisme menerima analogi "organisme", bahwa suatu satuan sosial atau politis akan mempunyai kualitas penyesuaian diri tertentu.

Paduan antara neo fungsionalisme dan integrasi maka diharapkan muncul sesuatu yang baru yaitu sebuah komunitas ekonomi politik. Dalam proses ini akan dibedakan antara organisasi dengan integrasi. Tidak seperti organisasi internasional yang menetapkan mekanisme kelembagaan antar bangsa, integrasi internasional membentuk mekanisme pembuatan keputusan di atas mereka (*supranasionalisme*). Singkatnya organisasi internasional adalah menetapkan mekanisme kelembagaan antar negara dan integrasi internasional merupakan bentuk mekanisme pembuatan keputusan. Pada dasarnya sampai hari ini mengenai aktifitas perdagangan dan investasi ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internasional secara terstruktur terdapat *World Trade Organization* (WTO) yang berperan, namun seringkali keberpihakan WTO bukan kepada negara-negara dunia Ketiga/negara-negara muslim yang marginal.

Selanjutnya terkait dengan tujuan integrasi tersebut strategi yang dapat diambil dunia Islam adalah pembentukan sebuah lembaga yang berperan sebagai *Islamic World Trade Organization* (IWTO). Jika melihat lembaga yang Lebih jelasnya lihat diagram berikut ini:

Bagan. 2

Proses Integrasi

Proses dari Hass:

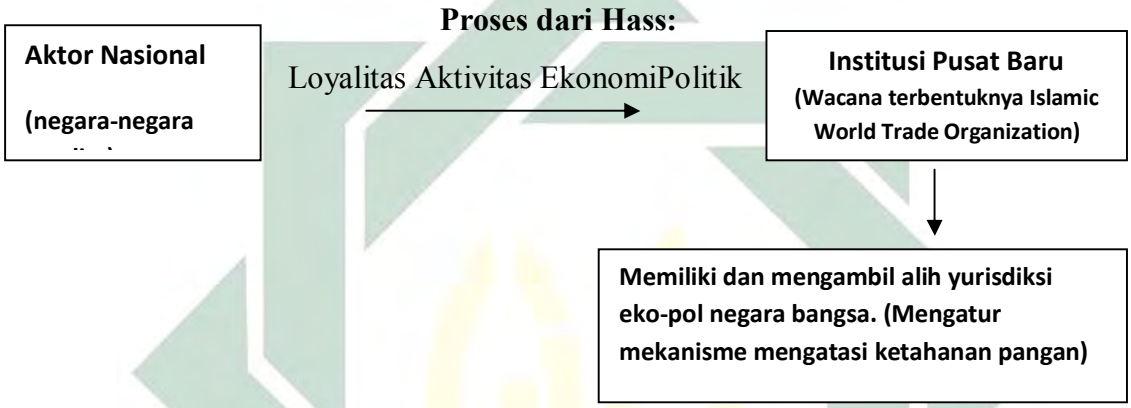

Tesis utama neo fungsionalisme adalah bahwa integrasi dalam satu sektor cenderung ekspansif merangsang timbulnya integrasi di sektor-sektor lain. Ini merupakan strategi yang ditawarkan untuk menuju unifikasi politik. Melalui IWTO negara-negara muslim akan terintegrasi dan memberikan loyalitas aktivitas ekonomi politiknya terhadap organisasi tersebut sebagai wakilnya dan selanjutnya organisasi IWTO akan memiliki dan mengambil alih yurisdiksi negara bangsa dalam konteks pengaturan ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Dari kerangka ini seluruh anggota IWTO harus tunduk terhadap apa yang menjadi aturan main dan ketentuan dalam aktivitas organisasi. Terkait penelitian ini, melalui fungsi kontrol terhadap laju investasi pertanian negara maju (kaya) di negara berkembang akan dapat terkendali dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dapat dilakukan. Dalam konteks negara muslim yang ketahanan pangannya baik dan yang ketahanan pangannya buruk akan dapat bekerja sama dengan mutualis melalui IWTO sebagai mediator dan regulator.

Integrasi ekonomi internasional dalam IWTO seperti yang diuraikan oleh Siddiqi dalam kerangka teoretik dimana universalitas, kooperasi, dan keadilan juga transaksi yang fair menjadi prinsip dasarnya harus dijalankan. IWTO secara ideal harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu menjadi pengatur lalu lintas perdagangan dan investasi antar negara muslim khususnya dan antara negara muslim dengan negara non-muslim.

Selanjutnya bagaimana IWTO mampu menjadi sebuah lembaga supranasional yang mampu mewakili eksistensi negara-negara muslim? Berbicara mengenai peluang dan tantangan IWTO dalam mengatasi krisis pangan atau ketahanan pangan maka untuk memudahkan melihat bagaimana sebenarnya kata kunci munculnya masalah pangan dapat dilihat dalam diagram yang didasarkan faktor *supply* dan *demand,* faktor pasar dan regulasi, serta faktor sosial, sebagai berikut:[564]

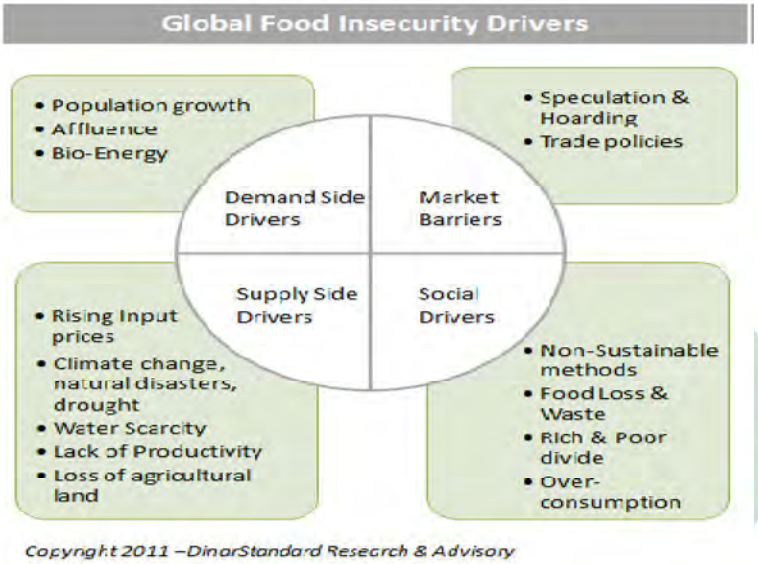

Dalam driver di atas sangat jelas bagaimana tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di negara-negara muslim khususnya dan dunia pada umumnya. Untuk menjelaskan bagan pengarah tantangan terhadap pemenuhan pangan dunia berdasar analisa dari dinar standard adalah sebagai berikut:

↳ *Demand side driver* (sisi permintaan)

- *Population growth*, mengenai pertumbuhan penduduk estimasi pertambahan penduduk dari PBB yang terakhir menyebutkan penduduk tahun 2011 meningkat 7 milyar.[565] Dari jumlah ini jelas berapa pertambahan di tahun-tahun ke depan. Jumlah penduduk yang demikian pesat dan semuanya membutuhkan makan dan bahan pangan. Faktanya 38% senantiasa dalam kondisi ketahanan pangan yang buruk.
- *Affluence*. Dalam konteks ini adalah adanya negara dengan permintaan pangan yang tinggi seperti China dan India.

[564] Lihat Dinar Standard Research & Advisory, Global Food Insecurity Drivers, 2011.
[565] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Bio-energy*, hal ini berhubungan dengan kurangnya lahan yang berkualitas untuk tumbuhan pangan.

↳ *Supply side driver* (sisi penawaran/persediaan)

- *Rising input prices,* kecenderungan meningkatnya harga minyak dunia mengakibatkan kenaikan harga pangan juga.
- *Climate change, natural disasters, drought*, beberapa negara yang menjadi lumbung pangan dunia mengalami gagal panen yang diakibatkan oleh perubahan cuaca, bencana alam, dan kemarau.
- *Water Scarcity*, semua hal membutuhkan air dan antara ketersediaan dan kebutuhan tidak berimbang mengakibatkan kelangkaan air.[566]
- *Lack of productivity & other best practices*, hal ini dipengaruhi oleh faktor produksi dan model permodalan di dalam mengupayakan produktivitas. Banyaknya masalah dalam hal akses akan modal dan sumber daya untuk produksi bahan pangan.
- *Loss of agricultural land*, hal ini jelas bahwa menyempitnya lahan pertanian dari tahun ke tahun. Menyempitnya lahan dipengaruhi faktor jumlah penduduk, ketinggian air laut, dan kadar garam air laut dalam tanah yang membuat lahan tidak subur, pengeringan lahan untuk industri.[567]

↳ *Market barriers* (batasan-batasan pasar)

- *Speculation & Hoarding*, adanya spekulasi pasar uang dan pembatasan secara nyata memberikan pengaruh terhadap harga pangan dunia.
- *Trade policies*, regulasi atau aturan mengenai perdagangan pangan semakin dipersulit terlebih lagi pasca krisis pangan tahun 2008, pembatasan ekspor atau aturan ekspor sangat dikontrol.

↳ *Social driver* (faktor sosial)

- *Food Loss & Waste*, hal ini disebabkan tidak efisiennya dalam produksi dan penggunaan atau pola konsumsi makanan. Misalnya: jumlah makanan yang dibuang di negara kaya/maju adalah sejumlah produksi makanan di negara kurang pangan di Afrika sub-Sahara.[568]
- *Rich & Poor divide,* adanya distribusi kemakmuran yang tidak merata antara negara dengan pendapatan tinggi dan negara dengan pendapatan rendah.

---

[566] Lihat Fiona Harvey, "Water scarcity: We must wring more from each precious drop," Financial Times, October 14, 2010, available at: http://goo.gl/MTSZf.

[567] Lihat FAO, *State World's Forests 2011*.

[568] FAO, *Global Food Losses & Food Waste (2011),* Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), available at: http://goo.gl/0qBdZ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Over-Consumption,* hal ini dipengaruhi oleh pola konsumsi di negara-negara kaya/maju, yang mana di satu sisi terjadi konsumsi makanan yang berlebih dan di sisi lain terjadi kekurangan pangan.
- *Un-sustainable Methods*, hal ini dipengaruhi gagal panen, sistem pertanian yang tidak berhasil, dan sebagainya, sehingga hubungan sinergis antara kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan tidak imbang.

Berbicara mengenai peluang maka penelitian ini akan fokus dengan apa yang bisa dilakukan oleh IWTO sebagai lembaga ekonomi Islam internasional. Melihat tantangan yang sangat kompleks maka tidak mungkin semua hal akan di selesaikan oleh IWTO. Dalam konteks ini maka paling tidak seharusnya IWTO dapat mengaktualkan fungsi dalam mengatasi *supply side* dan *market barriers*.

Dalam hal *supply side* maka negara-negara anggota IWTO akan memetakkan negara-negara mana yang dapat berfungsi substitusi jika terjadi masalah dalam pengadaan bahan pangan atau kongkritnya masalah pada sektor pertanian di negara potensial. Selanjutnya juga memetakkan negara mana yang mempunyai modal tinggi (kaya) namun impor bahan pangannya tinggi. Selanjutnya dalam hal keterbukaan dalam keanggotaan IWTO maka dipetakkan pula para investor dari entitas bisnis dari negara muslim maupun tidak misalnya perusahaan atau pelaku bisnis MNCs.

Kemudian mengenai *market barriers* jelas dalam uraian sektor pangan pada konteks global dan kondisi ketidaktahanan pangan dunia maka IWTO harus mampu mengantisipasinya. Langkah antisipasi sangat penting agar pelaku yang bermodal sedikit atau negara tujuan investasi yang tidak kaya tidak merugi ataupun dieksploitasi oleh pemodal kaya. Hal ini melihat fakta gerak agresif pemodal besar akan investasi pertanian di negara-negara muslim yang pada beberapa periode sebelumnya sama sekali tidak diminati seperti: Afrika sub-Sahara, Zambia, Kamerun, dan seterusnya. Dalam mengatasi ini posisi IWTO yang bebas dan objektif sudah seharusnya berfungsi mengatur laju investasi untuk kontrol sehingga ketahanan pangan di negara-negara muslim dapat diatasi. Lebih dari itu IWTO idealnya menjadi mediator dalam upaya pengentasan dari masalah ketidaktahanan pangan dan kemiskinan di negara muslim.

Selanjutnya jika IWTO sudah berusaha melaksanakan fungsinya maka negara-negara muslim yang menjadi anggota dan entitas bisnis yang menjadi anggotanya harus tunduk terhadap aturan main dalam investasi pertanian sebagai usaha mengatasi ketidaktahanan pangan bersama yang ditetapkan IWTO. Kemudian penting untuk ditekankan bahwa jika IWTO terwujud maka lembaga ini hendaknya mempunyai kewenangan menindak terhadap kemungkinan pelanggaran negara anggotanya, dan mampu mewakili semua elemen dan mengupayakan keadilan. Dengan bersama-sama mempunyai visi dan misi yang sama maka kekuatan ini akan mampu meminimalisir monopoli dan investasi besar-besaran yang berorientasi laba semata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi Pemetaan Negara-negara Muslim Berdasarkan Potensi Ekspor Impor

Dalam konteks terwujudnya IWTO maka untuk melihat pemetakkan potensi masing-masing negara anggota IWTO langkah awal dapat dilihat pemetakkan yang dilakukan *Dinar Standard* sebagai berikut:[569]

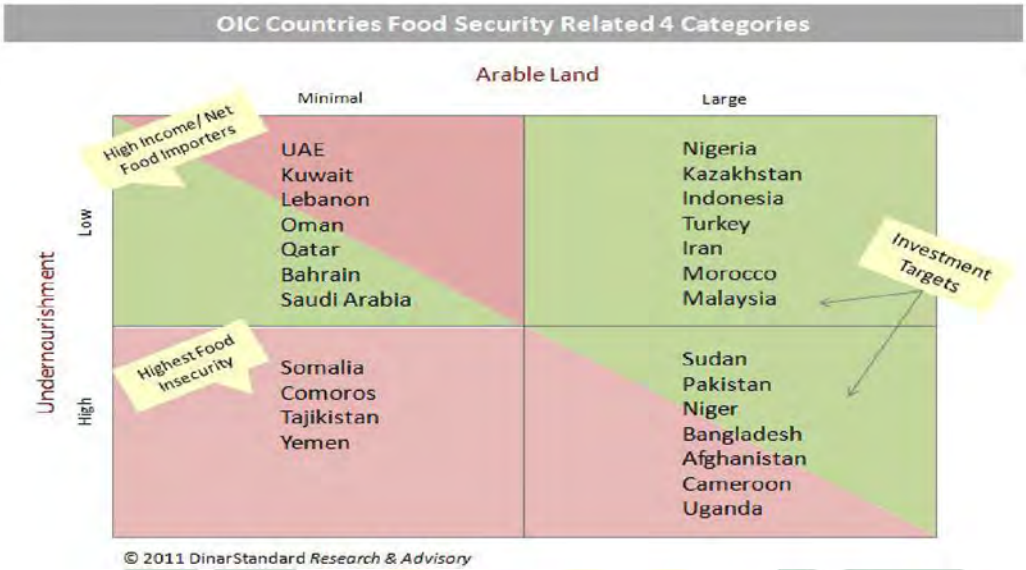

[569] Dinar Standard Research and Advisory, dapat di akses di www.dinarstandard.org.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya contoh aplikasi mekanisme *New Economy Strategy* (NES) adalah sebagai berikut:

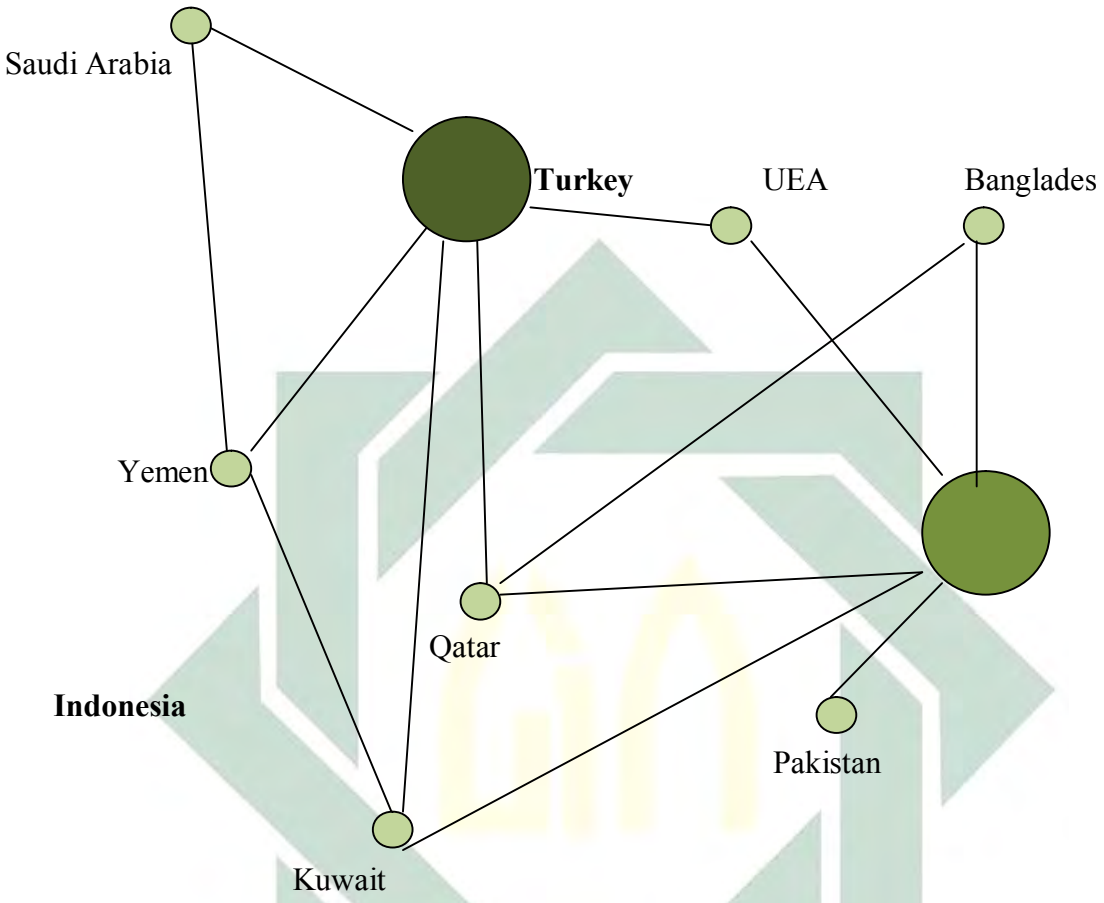

Dalam angka aplikasi pola klaster ini didasarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Value of Agricultural Imports and Export[570]

FAO Statistical Yearbook 2010 COUNTRIES	IMPORTS (US$ million)					EXPORTS (US$ million)				
	1999-2001	2003-2005	2006	2007	2008	1999-2001	2003-2005	2006	2007	2008
Bangladesh	1,726	2,093	2,723	3,517	3,079	107	140	259	334	236
Indonesia	4,292	4,926	5,949	8,633	10,550	4,815	9,110	14,270	62	96
Kuwait	1,246	1,179	1,703	1,868	2,297	55	44	48	334	345

[570] Diolah dari Statistics Division FAO 2010, lihat: www.fao.org

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pakistan	1,893	2,294	3,475	3,723	5,281	1,093	1,395	2,026	13,482	14,168
Qatar	355	543	858	1,059	1,671	8	23	20	429	512
Saudi Arabia	4,929	7,215	9,252	11,710	12,266	392	1,042	1,495	7,735	7,901
Turkey	2,769	4,560	5,223	7,251	10,275	3,975	6,165	6,329	646	954
Uganda	146	303	396	477	629	272	297	454	3	13
United Arab Emirates	2,816	4,154	7,098	7,641	10,603	905	1,946	1,690	4	4
Yemen	766	1,166	1,438	2,122	2,601	66	121	145	22,874	24,993
World	439,446	621,219	747,025	906,887	1,104,776	414,167	595,537	721,951	18	23

Sumber: Diolah dari FAO Stastistical Yearbook 2010, www.fao.org

Dari diagram NES di atas dapat dijelaskan bahwa negara *hubs* dalam hal ini adalah Indonesia dan Turkey. Negara *hub* direpresentasikan sebagai negara yang mempunyai lahan yang cocok untuk pertanian (*arable land*) yang luas dan angka ketahanan pangan yang rendah dan lebih dari itu mempunyai komoditas pangan yang cukup penting untuk mendukung arah pembangunan antar negara Islam. Negara *nodes* direpresentasikan oleh antara lain UEA, Qatar, Kuwait, dan Saudi Arabia sebagai negara kaya dan import tinggi, sedang Pakistan dan Banglades menjadi subklaster lainnya yang mempunyai karakter ketidaktahanan pangan tinggi namun lahan pertanian luas sehingga dapat membuat jaringan di luar *hub* juga dengan negara kaya. Aplikasi NES sebagaimana tergambar di atas merupakan salah satu contoh rangkaian klaster dan subklaster, sehingga dapat pula dibuat dalam pola klaster lainnya dengan catatan sesuai dengan kerangka *hub* dan *node*.

Pada dasarnya masing-masing negara telah berupaya untuk mengambil kebijakan-kebijakan negara baik kebijakan nasional maupun regional yang ditujukan untuk mengatasi krisis pangan antar negara muslim. Namun demikian, fakta memperlihatkan bahwa untuk mengatasi ketahanan pangan dan kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan pemerintah (sektor pemerintah saja) namun juga keterlibatan pelaku bisnis dan investasi. Dalam konteks fakta ini maka pendekatan itntegrasi dan NES menjawab pola manajemen kerjasama antar negara Islam yang efektif dalam mengatasi krisis pangan dan kemiskinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan menggunakan pola ini maka dapat diidentifikasi wilayah negara-negara muslim mana yang mempunyai kesempatan untuk tumbuhnya investasi bahan pangan dan industri makanan. Dalam pola hubungan *hub* dan *node* sebagaimana tergambar nama negara dapat diwakili oleh aktor negara itu sendiri ataupun pelaku bisnis dari negara tersebut. Dan wacana terbentuknya IWTO akan berfungsi sangat signifikan terutama dalam pengaturan *supply side* dan *market barrier*. IWTO akan berfungsi tidak jauh berbeda dengan WTO yang ada sekarang ini namun IWTO mempunyai filosofi keberpihakan kepada negara-negara miskin di wilayah dunia Islam. Dari dasar filosofi yang berbeda dengan WTO maka IWTO tentu tidak akan menjadi wakil dari kepentingan segelintir pemodal besar dan berhaluan liberal yang merugikan petani.

Selanjutnya IWTO juga akan mengidentifikasi dan mengatur investasi pelaku bisnis pangan agar tepat sehingga disatu sisi negara muslim kaya namun import pangan tinggi akan berinvestasi di negara muslim berkembang atau miskin namun lahan pertanian luas. Pola manajemen kerjasama yang efektif "intergrasi hub dan node" ini akan dapat menjadi langkah positif dan kongkrit jika diterapkan dalam kerangka mengatasi ketidaktahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Di setiap pola klaster ini diharapkan mampu mewujudkan *spillover effect* sehingga setiap jaringan akan berdampak secara efektif pula bagi jaringan yang lainnya.

Kesimpulan

Fakta ketidaktahanan pangan tang tinggi dan jumlah kemiskinan di negara muslim yang signifikan adalah sesuatu yang sangat penting dibahas dalam konteks ekonomi Islam. Terwujudnya al-*falah* sebagai tujuan ekonomi Islam hanya akan menjadi idealisme jika masalah krisis pangan dan kemiskinan di negara muslim belum dapat diselesaikan. Penelitian ini menghasilkan manajemen strategi dalam mengatasi masalah krisis pangan negara muslim dan juga kemiskinan di dalamnya. Strategi yang pertama adalah sesuai kerangka Siddiqi tentang ekonomi internasional dalam Islam yakni prinsip kerjasama dengan sarat nilai humanitarian dan berpihak pada yang lemah. Berawal dari filosofi Siddiqi ini maka penting untuk membangun mekanisme terintegrasinya ekonomi negara muslim melalui suatu lembaga supranasional yang tidak liberal dan berpihak pada yang lemah yakni wacana terwujudnya *Islamic World Trade Organization* (IWTO). Selanjutnya, IWTO akan bertindak sebagai fungsi perlindungan *supply side* dan *market barrier* dalam investasi pangan antar negara muslim. Selanjutnya mekanisme investasi terwujud melalui kerjasama saling menguntungkan dan saling melengkapi melalui pola klaster *New Economy Strategies* yakni jaringan antara *hub* dan *node*. Dari seluruh pembahasan di atas jelas bahwa melalui manajemen strategi dimana filosofi ekonomi Islam menjadi dasar utama, maka ketahanan pangan masing-masing negara muslim akan lebih kuat dan kemiskinan dengan perlahan dapat teratasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

REFERENSI

Anto, M.B. Hendri. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA).

Baker, Chris and Dariuzs Galasinaaski. 2001. *Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity*, (London: SAGE Publications Ltd.).

Behnassi, Mohamed, Sidney Draggan, and Sanni Yaya (Ed.). 2011. *Global Food Insecurity, Rethinking Agricultural and Rural Development Paradigm and Policy*, (New York: Springer, 2011).

Daugherty, James and Robert L. Pfaltzgraff, Jr. 1990. *Contending Theories of Internastional Relations A Comprehensive Survey Third Edition*, (New York: Harper Collins Publisher).

FAO. 2009. *High Level Task Force on the Global Food Security Crisis Progress Report April 2008-October 2009* (United Nations-FAO).

Ghazali, Aidid dan Syed Omar (eds). 1989. *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications).

Islahi , A.A. 1992. "Economic Concept of Ibn Taimiyyah", dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought).

Karapinar, Baris and Christian Harbeli (Ed). 2010., *Food Crisis and The World Trade Organization*, (New York: Cambridge University Press).

Khan, Muhammad Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*, (Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Institutes of Policy Studies, IIIT)

Krugman, Paul. 1995. "Growing World Trade" in *Brookings Papers on Economic Activity*.

al-Mawardy, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-, *al-Ahka`m al-Sultha`niyyah*, Dar al-Fikr, Beirut [nd].

Sadeq, A.H.M. 1989. *Islamic Economics Some Selected Issues*, (Lahore-Pakistan: Islamic Publications (PVI) Ltd.).

Sadeq, Abul Hasan M. dan Aidit Ghazali (Ed). 1992. *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought).

Seline, Richard. 2005. "Global Hubs and Global Nodes: Challenging Traditional Views of Communities, Clusters and Competitiveness", *Community College Journal*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vol. 76 (3), 2005, 38-41. Dapat diakses: http://www.aacc.nche.edu/Publications/CCJ/Pages/default.aspx

Shaw, John. 2007. *World Food Security: A History Since* 1945, (New York: Palgrave Macmillan).

Siddiqi . M.N. 1992. "Principles of International Economic Relations in Islam", dalam Islamic Development Bank and Islamic Research and Training Institute, *International Economic Relations from Islamic Perspectives*, (Jeddah, Saudi Arabia: IDB-IRTI).

United Nations. 2010. Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision.

Wallerstein, Immanuel. 2005. *World System Analysis: An Introduction,* (Amerika: Duke University Press).

Website:

Baca: *"The World Trade Organization and the Post-Global Food Crisis Agenda: Putting Food Security First in the International Food System,* see: http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20111116_briefing_note_05_en.pdf

Dinar Standard Analysis, dapat di akses pada: dinarstandardanalysis.org.

Dinar Standard Research & Advisory, Global Food Insecurity Drivers, 2011.

Dinar Standard Research and Advisory, dapat di akses di www.dinarstandard.org.

FAO "FAO Food Security 2011" Report, available at: http://www.fao.org/publications/sofi/en/.

FAO, *Global Food Losses & Food Waste (2011),* Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), available at: http://goo.gl/0qBdZ.

FAO, *State World's Forests 2011*.

Fiona Harvey, "Water scarcity: We must wring more from each precious drop," Financial Times, October 14, 2010, available at: http://goo.gl/MTSZf.

http://regional.kompas.com/read/2009/09/04/0419296/Menyemai.Bibit.Baru.Krisis.Pangan. Diakses 10 Maret 2012, jam 10.00 wib.

Statistics Division FAO 2010, lihat: www.fao.org

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id